

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perihal tersebut berhubungan erat dengan tujuan Pendidikan nasional ialah meningkatkan kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur serta berkepribadian yang kokoh, cerdas trampil serta membina ikatan yang baik antara sesama manusia dan lingkungan. sebab itu, seluruh proses yang terjalin sepanjang berlangsungnya pendidikan, perlu terdapatnya pengembangan serta pengarahan agar menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Menurut Mulyasa upaya meningkatkan mutu pendidikan terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Perihal tersebut lebih terfokus lagi sesudah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan guna meningkatkan mutu pada tiap kategori serta jenjang Pendidikan.¹ Salah satu komponen terutama dalam peradaban suatu negeri merupakan sistem pembelajaran yang maju, bermacam usaha serta upaya sudah di jalani guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional supaya tetap memperoleh hasil yang diharapkan, bermacam berbagai usaha yang dicoba semacam pelatihan serta kompetensi guru, pengadaan danperbaikan fasilitas serta prasarana, pengadaan perlengkapan pengajaran serta buku- buku dan mengevaluasi dan tingkatkan kualitas manajemen sekolah telah di jalani, tetapi realitasnya kualitas pendidikan nasional belum membuktikan penanda yang

¹ Mulyasa. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 2.

berarti serta menyebabkan kesenjangan dalam dunia pendidikan, sebagian sekolah yang terletak di kota- kota membuktikan perihal menggembirakan terhadap kenaikan kualitas pendidikannya, tetapi sebagian yang lainnya terlebih di daerah- daerah pelosok serta perbatasan masih sangat memprihatinkan.

Terdapat bermacam aspek yang menimbulkan kualitas pendidikan kita hadapi kenaikan secara tidak menyeluruh. Pertama, kebijakan serta penyelenggaraan pendidikan nasional memakai pendekatan educational production function ataupun input- output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis sentralistik, sehingga tingkatan sekolah selaku penyelenggaraan pendidikan yang bergantung pada keputusan birokrasi-birokrasi. Kadang- kadang birokrasi itu sangat panjang serta kebijakannya tidak cocok dengan keadaan sekolah setempat. Hingga akses dari birokrasi panjang serta sentralisasi itu, sekolah jadi tidak mandiri, minimnya kreatifitas serta motivasi Ketiga, sedikitnya peranan masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orang tua sejauh ini dengan sebatas pendukung dana, tetapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan semacam mengambil keputusan, monitoring, penilaian serta akuntabilitas, sehingga sekolah tidak mempunyai beban serta tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/ orang tua selaku stake holder yang berkepentingan dengan pembelajaran. Keempat, krisis kepemimpinan, dimana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, sistem *top down policy* baik dari kepala sekolah terhadap guru ataupun birokrasi di atas kepala sekolah

terhadap sekolah.²

Di dalam suatu organisasi lembaga pendidikan ialah sekolah, kepala sekolah selaku pemimpin yang hendak membawa sekolah pada arah pencapaian mutu sekolah sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Engkoswara serta Komariah menyatakan bahwa:“ kepemimpinan pendidikan merupakan sesuatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi serta menggerakkan perilaku orang lain dan melaksanakan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan”.³ Kepala sekolah jadi kunci keberhasilan serta kemajuan peningkatan mutu sekolah. Ini karna sekolah itu sendiri ialah suatu organisasi lembaga pendidikan yang wajib mempunyai seseorang pemimpin yang bermutu. Pemimpin yang bermutu, sebaiknya sanggup membawa sekolah pada arah tujuan yang searah dengan visi misi, dan sanggup menanggulangi bermacam hambatan yang dialami.⁴

Kepala sekolah juga harus bisa mengendalikan lingkungan fisik guna memotivasi guru supaya bisa mengerjakan tugas secara optimal. Menghasilkan atmosfer kerja yang menyenangkan. Memberikan dorongan arahan serta support kepada guru dan pemberian penghargaan kepada guru itu semua akan membangkitkan semangat kinerja guru. Seorang kepala sekolah pula butuh memberikan hukuman kepada guru- guru yang salah. Dia juga berperan mengawasi aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran⁵.

² Made Pidarta, *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 321

³ Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 30.

⁴Rachmawati, *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru*. Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, ISSN No.108 tahun 2013, 16

⁵ Nurchiyah. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar*. Jurnal Pendidikan Dasar, ISSN. Volume : V - Nomor : 7 tahun 2015, 3

Keberhasilan serta kenaikan kualitas yang dicapai oleh sekolah pastinya bukan hanya kepala sekolah yang bergerak sendiri, namun turut andil dari tenaga pendidik. Di dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa:“ pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat terutama bagi pendidik padaperguruan tinggi”. Dalam perihal ini yang diartikan tenaga pendidik di sekolah merupakan guru. Apalagi bisa dikatakan kalau pengaruh guru sangat besar terhadap peningkatan mutu sekolah. Penyebabnya, guru lah yang berperan langsung dalam proses pendidikan yaitu proses pembelajaran. Keberhasilan dan peningkatan kualitas di sekolah pastinya dilihat dari keberhasilan dalam proses pendidikan tersebut.⁶

Sekolah dasar bermutu merupakan sekolah yang sanggup memfungsikan segala komponen- komponen sekolah secara efisien serta efektif dalam upaya mewujudkan proses pendidikan yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran tercapai, sebagai wadah proses bimbingan, proses sosialisasi, serta proses transformasi. Pada kesimpulannya sekolah sanggup membawakan anak didik jadi seseorang terdidik, mempunyai ilmu pengetahuan serta teknologi, termasuk pula kebudayaan bangsa yang membuatnya siap merambah ke sekolah berikutnya. Secara nasional, upaya mewujudkan SD bermutu berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, difasilitasi dengan kebijakan implementasi

⁶ UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6> (di akses pada tanggal 22 September 2021).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (UU No 20 Tahun 2003 tentang SPN). Depdiknas merumuskan MBS ialah model manajemen yang membagikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Sekolah didorong untuk mengambil keputusan partisipatif yang mengaitkan secara langsung seluruh masyarakat sekolah(guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, serta masyarakat). Perihal itu ditunjukkan untuk meningkatkan mutu sekolah bersumber pada kebijakan pendidikan nasional. Melalui MBS diharapkan sekolah sanggup menghadapi setiap tantangan serta ancaman sekolah pada tingkatan lokal, nasional, ataupun internasional, sanggup memaksimalkan sumber daya sekolah, serta meminimalkan bahkan melenyapkan keterbatasan sekolah.⁷

Manajemen Berbasis Sekolah ialah suatu strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negeri serta pemerintah wilayah kepada pelaksana di sekolah. Kemampuan kepala sekolah SD menyusun rencana pengembangan sekolah, mengorganisasir, menggerakkan orang/ personel, mengatur, serta memantau, dan memperhitungkan kemajuan sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah menggapai ataupun melampaui standar mutunya, aspek penentu keberhasilan sekolah merupakan kontribusi kepala sekolah. Tetapi, dalam praktiknya sebagian besar kepala SD masih menghadapi kesulitan mengelola serta memimpin sekolahnya. Indikatornya antara lain: prestasi siswa belum memuaskan, partisipasi warga dalam pembelajaran masih rendah, karya inovatif serta kreatif

⁷ Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan.*(Jakarta : Dirjen Dikdasmen.2001), 3

guru masih sangat jarang, serta proses pendidikan model PAKEM belum banyak terjadi.

Munculnya paradigma Guru tentang manajemen berbasis sekolah yang bertumpu pada penciptaan iklim yang demokratisasi serta pemberian keyakinan yang lebih luas kepada sekolah guna menyelenggarakan pendidikan secara efektif serta bermutu. Perihal ini sangat memungkinkan dengan dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah nomor. 22 tahun 1999, selanjutnya diubah dengan UU nomor. 32 tahun 2004 ialah Undang- Undang Otonomi Wilayah yang setelah itu diatur oleh PP nomor. 33 tahun 2004 yakni terdapatnya penggeseran kewenangan serta pemerintah pusat ke pemda dalam berbagai bidang tercantum bidang pendidikan kecuali agama, politik luar negara, pertahanan serta keamanan, peradilan, moneter serta fiskal yang setelah itu pada tahun 2014 Undang- Undang tersebut direvisi kembali menjadi UU nomor. 23 tahun 2014. Pola bidang pendidikan di atas oleh UU Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan pasal 51 melaporkan pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, serta pembelajaran menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.⁸

Fakta yang ditemukan pada hasil observasi awal peneliti mewawancarai Kepala SD Negeri Sobontoro 1 ialah sekolah telah mempraktikkan MBS selaku bagian dari sistem pendidikan nasional, SD Negeri Sobontoro 1, sudah melaksanakan model manajemen ini selaku perwujudan otonomi pemerintah dalam pendidikan. Kepala sekolah dari sekolah tersebut

⁸ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 61.

dalam kepemimpinannya mencermati sumber daya yang terdapat dalam sekolah tersebut, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah menyertakan seluruh guru, komite sekolah serta jika perlu juga melibatkan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat termasuk sangat baik, manajemen peserta didik juga sangat diperhatikan baik oleh kepala sekolah ataupun oleh para tenaga pendidik. Dalam perihal anggaran, sekolah ini menerapkan transparansi dana. Sehingga dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, sekolah lebih leluasa dalam mengembangkan program- program yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki sekolah, guna memelihara eksistensinya di tengah- tengah persaingan yang semakin ketat serta tingginya kepercayaan yang diberikan oleh warga kepada SD Negara Sobontoro 1.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti mengenai masalah tersebut dengan judul “ kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Sobontoro 1”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi kajian dalam pembahasan Manajemen Berbasis Sekolah di fokuskan dalam salah satu indikator MBS yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat:

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan MBS di SDN Sobontoro 1
2. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membina peran aktif warga

sekolah di SDN Sobontoro 1

3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membina peran aktif masyarakat di SDN Sobontoro 1

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SDN Sobontoro 1
2. Untuk mengetahui pembinaan kepala sekolah terhadap peran aktif sekolah, administrator, guru, orang tua siswa dan pihak-pihak terkait pendidikan di SDN Sobontoro 1
3. Untuk mengetahui keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola Pendidikan di SDN Sobontoro 1

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang hakikat kepemimpinan, pengembangan serta pelaksanaannya dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dan diharapkan menjadi masukan serta menambah paradigma baru bagi sekolah dalam mengembangkan kepemimpinan dengan mengasah kemampuan sumber daya yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru, digunakan untuk memotivasi guru dalam pemanfaatan sarana sekolah, serta mencari dan mengembangkan metode pembelajaran yang bervariasi guna meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi serta hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih bersemangat lagi, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat pada seluruh mata pelajaran, serta siswa dapat lebih mencintai sekolahnya
- c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- d. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan metodologi peneliti dan media dalam pengetahuan tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan penelitian ini, penulis memahami penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Dewi Julita, menyimpulkan bahwa (1) kepala sekolah masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari segenap elemen

masyarakat dalam penerapan konsep manajemen berbasis sekolah, (2) kebijakan pemerintah dalam mendukung penerapan manajemen berbasis sekolah juga masih lemah sebab masih kurang pelatihan bersifat peningkatan SDM.⁹

2. Indra Haryanto Sindang Lurah, Haryanto, menyimpulkan bahwa (1) SDIT Jabal Nur telah menerapkan MBS dan hal tersebut dapat diketahui melalui kemandirian yang dimiliki, baik kemandirian fisik maupun non-fisik, serta adanya partisipasi aktif stakeholder.(2) Peran kepala sekolah yang dominan dalam penerapan MBS adalah peran manajerial, karena kepala sekolah bisa memilih langsung siapa yang menjabat dalam struktur organisasi sekolah. 3) Peran sekolah dalam konteks MBS adalah sebagai motor penggerak bagi kehidupan sekolah. Peran tersebut adalah kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, wirausahawan, motivator, dan klimator. (4) Faktor penghambat dalam penerapan MBS adalah komunikasi yang belum berjalan dengan baik di sekolah serta kurangnya sosialisasi untuk penerapan MBS, sedangkan faktor pendukung adalah peran aktif warga sekolah dalam pelaksanaan MBS dan pemberian wewenang atau otonomi yang besar dari yayasan

⁹ Dewi Julita, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah Pada SD Negeri 2 Gunung Samarinda Kabupaten Abdy”.(Universitas Syiah Kuala 2013),

kepada sekolah.¹⁰

3. Risal, menyimpulkan bahwa (1) peran kepala sekolah telah memenuhi karakteristik sebagai seorang kepala sekolah karena mampu memimpin bawahannya dengan baik, sanggup mendayakan sumber daya yang ada di sekolah karena kepala sekolah sangat berperan penting dalam kesuksesan pelaksanaan MBS, terutama dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen hubungan masyarakat. (2) Kepala sekolah berusaha melaksanakan MBS secara efektif dan efisien sehingga tujuan sekolah dapat terlaksana. (3) Faktor pendukung yaitu, kondisi sekolah yang kondusif dalam proses pembelajaran baik lingkungan maupun hubungan sesama guru serta hubungan dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, adanya kepercayaan dari masyarakat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. (4) Sedangkan faktor penghambat penerapan manajemen berbasis yaitu masih kurangnya pemahaman tentang konsep MBS di kalangan masyarakat serta kesulitan dalam menggalian dana untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹¹
4. Annisa Rizki Aulia, menyimpulkan bahwa (1) Kepemimpinan kepala SD Negeri 1 Boyolali kategori dalam tipe kepemimpinan transformasional dengan ciri-ciri antara lain kepala sekolah dalam berbagai hal membangun komitmen bersama terhadap sasaran organisasi dan memberikan kewenangan berupa kepercayaan kepada para pengikutnya yaitu guru, staf

¹⁰ Indra Haryanto Sindang Lurah, Haryanto. *“Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di SDit Jabal Nur Gamping, Sleman”*. (Universitas Negeri Yogyakarta 2014), 174

¹¹ Risal. *“Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Negeri 3 Kulo Kab. Sidrap”*. (Universitas Islam Alaudin Makasar, 2016), 10

dan karyawan untuk mencapai sasaran, jalannya organisasi bukan digerakan oleh birokrasi tetapi oleh kesadaran bersama hal ini sejalan dengan MBS dimana kewenangan sekolah dalam pengelolaan sangat luas, juga adanya partisipasi aktif dari stakeholder. (2) Manajemen kepala sekolah di SD Negeri 1 Boyolali sudah menerapkan beberapa komponen manajemen sekolah, sedikitnya ada tujuh komponen manajemen sekolah yang sudah dikelola, yang meliputi kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, hubungan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan yang ada. (3) Kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Boyolali partisipatif meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan sehingga SD Negeri 1 Boyolali dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas baik secara akademis maupun non akademis. Manajemen berbasis sekolah sudah berhasil dengan baik ditandai warga sekolah memiliki inisiatif dalam menjalankan pekerjaannya dan inisiatif individu dihargai.¹²

Dari ke-empat penelitian relevan yang telah di lakukan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu di antaranya: persamaanya adalah berfokus pada kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi sekaligus kondisi dari peneliti

¹² Annisa Rizki Aulia. "*Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Negeri 1 Boyolali*". (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017),